

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amelia Cahyadi, Zainal Muttaqin, Anandya Saraswati Ardiwinata, 2023, *Hukum Pengawasan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok.
- Benny K. Harman, 2012, *Negeri Mafia Republik Koruptor Menggugat Peran DPR Reformasi*, LAMALERA, Yogyakarta.
- Charles Simbura, 2016, *Pengisian Jabatan Pimpinan Lembaga Negara Independen*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Fajar Laksono, Subarjo, 2006, *Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden*, UII Press, Yogyakarta.
- Galang Taufani dan Suteki, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok.
- Gunawan A. Tauda, 2012, *Komisi Negara Independen (Eksistensi Independent Agencies sebagai cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan)*, Genta Perss, Yogyakarta.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mitra Buana Media, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Konstitusi Press, Jakarta.
- _____, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Maria Farida Indrati S, 2018, *Ilmu Perundang-Undang*, KANISIUS, Jakarta.
- Max Bobby, 1994, *DPR RI RI Dalam Perspektif Sejarah Dan Tatanegara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Moh Kusnardi, Bintan R. Saragih, 1978, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, PT Gramedia, Jakarta.

Muhammad Citra Ramadhan, 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Kaizen Sarana Edukasi , Yogyakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Patrialis Akbar, 2012, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Soejono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Soewarno Handyaningrat, 1995, *Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta.

UU Nurul Huda, 2020, *Hukum Lembaga Negara*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Yuliandri, 2009, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik : Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zainal Arifin Mochtar, 2016, *Lembaga Negara Independen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

TAP MPR No. XI/MPR/1998.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.36-40/PUU-XV/2017.

C. Jurnal

Andi Ippeh, 2014, "Keberadaan Hak Angket Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pemerintah.", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 2, Edisi 3.

Dasep Muhammad Firdaus, 2018, "Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)", Jurnal Sunan Gunung Djati State Islamic University (UIN), Vol. 20 No.2.

Evi Purnamawati, 2019, "Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penggunaan Hak Angket Menurut Undang-Undang Dasar 1945.", Jurnal Universitas Palembang, Vol. 17 No.3.

Hananto Widodo, 2012, "Politik Hukum Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.", Jurnal RechtsVinding, Vol.1, No.3.

_____, 2020, "Perluasan Kewenangan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.", Jurnal Perspektif Hukum, Vol.20 No.2.

Hermayanti, 2010, "Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Menyatakan Pendapat DPR dan Implikasinya Terhadap Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden.", Jurnal Lex Specialist.

Irma Mangar, Muhammad Rosyid Ridho, 2022, "Lembaga Negara Independen Dalam Ketatanegaraan Indonesia.", Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora , 1 (2) UIN Sunan Gunung Djati Bandung

- Kristiawanto, 2020, "Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sebagai Fungsi Pengawasan Lembaga Negara.", Jurnal Penelitian Hukum Legalitas, Vol. 14 No. 1.
- M. Beni Kurniawan , 2018 , "Problematika dalam pengisian jabatan pimpinan komisi pemberantasan korupsi", JIKH, Vol. 12 , No.2.
- Mei Susanto, 2018, "Hak Angket DPR, KPK dan Pemberantasan Korupsi.", Jurnal Integritas, Vol. 4 No.2.
- Moh Rizaldi, 2021, "Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara Independen?", Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, Vol.12 No.1.
- Muhammad Ali, 2018, "Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.", Jurnal Jurist-Diction Universitas Airlangga, Vol. 1 No.1.
- Putu Eva Ditayani Antari, 2020, "Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia.", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 2.
- Risman Marten Parinding, 2018, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.", Jurnal Lex Administratum, Vol.VI, No.1.
- Rony, 2016 , "Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang" , Jurnal Hukum Respublica, Vol.16 , No 1.
- Subardjo, 2016, "Penggunaan Hak Angket Oleh DPR RI Dalam Mengawasi Kebijakan Pemerintah.", Jurnal Ilmu Hukum Novelty, Vol. 7 No.1.
- Sunardi , 2018 , "Fungsi Pengawasan DPR Terhadap Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance dan Clean Governance Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum.", Jurnal Meta Yuridis , Vol.1 , No.2.
- Sunarto , 2017 , "Fungsi legislasi DPR Pasca Amandemen UUD 1945" , Jurnal Intergralistik , No.1/Th.XXXVIII/2017.
- Syofyan Hadi, 2015, "Prinsip Checks and Balances dalam Struktur Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia.", Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum Edisi: Januari – Juni.
- Totok Sugiarto, 2013 , "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." , Jurnal Cakrawala Hukum , Vol.18 , No. 1.

D. Internet

- Aryo Putranto Saptohutomo, "*Nawawi Pomolango Dilantik Jadi Ketua KPK dan Pro Kontra Para Pakar.*" ,
<https://nasional.kompas.com/read/2023/11/28/05150071/nawawi-pomolango-dilantik-jadi-ketua-kpk-dan-pro-kontra-para-pakar?page=all>
- Bagus Prihantoro Nugroho, "*Hak Angket DPR dari Zaman Bung Karno Hingga Kini.*" , <https://news.detik.com/berita/d-3486903/hak-angket-dpr-dari-zaman-bung-karno-hingga-kini>.
- Berita Terkini, 2022 , "*Tugas Ketua KPK dalam Mempimpin Pemberantasan Korupsi.*" (online) , <https://kumparan.com/berita-terkini/tugas-ketua-kpk-dalam-mempimpin-pemberantasan-korupsi-1zOno5YLLyo>
- Hukumonline, "*Tugas DPR dalam fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan*" , <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dpr-dalam-fungsi-legislasi--anggaran--dan-pengawasan-lt653b8c7e830d5/>
- Kadek Melda Luxiana, "*Pukat UGM Soroti Dasar Hukum Pengangkatan Nawawi Jadi Ketua KPK Sementara.*" ,
<https://news.detik.com/berita/d-7060036/pukat-ugm-soroti-dasar-hukum-pengangkatan-nawawi-jadi-ketua-kpk-sementara>
- Sekretariat Jendral DPR RI, "*Sejarah Terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*" , (online) ,
<http://www.dpr.go.id/tentang/sejarah-dpr>
- Sekretariat Jendral DPR RI, "*Tugas dan Wewenang.*" , (online) ,
<http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "*Presiden Jokowi Lantik Tiga Pimpinan Sementara KPK Pengganti Samad, Bambang, dan Busyro.*" , <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-lantik-tiga-pimpinan-sementara-kpk-pengganti-samad-bambang-dan-busyro/>
- Tito Dirhantoro, "*Pakar Hukum Pidana Nilai Pelantikan Nawawi Pamolango sebagai Ketua KPK Cacat Hukum, Romli : Tidak Sah.*" , <https://www.kompas.tv/nasional/464409/pakar-hukum-pidana-nilai-pelantikan-nawawi-pamolango-sebagai-ketua-kpk-cacat-hukum-romli-tidak-sah?page=all>